

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik (*good governance government*) mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan memiliki akuntabilitas, pemerintah sebagai organisasi sektor bertujuan menyediakan dan memproduksi barang-barang publik. Tujuan dari organisasi sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah diwajibkan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dapat berupa laporan keuangan yang baik yang akan diaudit oleh badan pemeriksa keuangan kemudian baru disampaikan kepada pengguna kepentingan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat diartikan sebagai media dari entitas pemerintah yang dibuat untuk memberi pertanggungjawaban atas kinerja keuangannya dan disajikan kepada publik. Gambaran baik dan buruknya suatu pemerintahan dapat dilihat dari LKPD, sehingga pemerintah daerah (pemda) berkewajiban untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.pembuatan serta

penyusunan laporan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat salah satunya pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah diwajibkan membuat laporan keuangan daerah dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal pembuatan dan harus transparan dalam membuat agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna informasi karena salah satu indikator pemerintahan yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi standar pembuatan dan sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan sangat diperlukan pemerintah karena banyak informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan pemerintah diharapkan dapat menggunakan keputusan secara bijak supaya dapat menjadikan pemerintahan yang semakin baik untuk kedepannya.

كَانَ اللَّهُ إِنَّ<sup>٥</sup> بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ<sup>٤</sup> بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ<sup>٣</sup>  
بَصِيرًا سَمِيعًا

Terjemahan Arti: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam QS. An-Nisa ayat 58 diatas, Allah menyuruh manusia untuk menerapkan sifat amanah dalam kehidupan kepada yang berhak menerimanya, Allah juga menyuruh manusia untuk berlaku adil jika menetapkan hukum diantara manusia. dalam pekerjaan sebagai akuntan sangat diperlukan memiliki etika yang dapat menyampaikan amanah dengan baik karena jika tidak sangat merugikan pihak pihak pengguna informasi.

Kualitas laporan keuangan diharapkan terus mengalami peningkatan dikarenakan laporan keuangan dapat sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang

diharapkan dapat menjadikan pemerintahan yang semakin baik dalam melakukan kinerjanya dan dapat berkelanjutan. Menurut Wati et al., (2014) Sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas dari hasil laporan keuangan daerah, sumber daya manusia merupakan individu yang dapat bekerja sebagai penggerak suatu entitas yang harus dilatih kinerjanya dan dapat dikembangkan kemampuannya. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kompetensi pegawai pemerintahan dalam membuat laporan keuangan karena masih banyak ditemukan laporan keuangan yang kurang berkualitas, jika sumber daya manusia belum berkompeten dalam melakukan pekerjaannya maka hal ini dapat menghambat proses kerja dan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Harnoni, 2016). Dengan demikian kompetensi SDM adalah kemampuan setiap individu yang berupa daya pikir dan daya fisik yang dipengaruhi oleh lingkungannya dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kinerjanya sumber daya manusia mengolah data dengan pemanfaatan dari teknologi informasi yang dari zaman ke zaman akan terus mengalami perkembangan teknologi penyedia jasa diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan lebih efisien dan efektif sehingga dapat menyediakan data yang baik bagi para pengguna informasi. Dalam penelitian Haza, (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia semakin berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan sedangkan dari penelitian Wijayanti, (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan hal tersebut dikarenakan pada SKPD wilayah tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Namun, pemerintah setempat telah melakukan berbagai tindakan yang dapat mendukung dan dapat mempermudah pekerjaan bagian akuntansi dengan menggunakan

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan penyelenggaraan seminar tentang ketatausahaan, sehingga laporan keuangan tetap sesuai dengan standar yang ada.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dioptimalisasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang, teknologi informasi dapat mempengaruhi keterandalan dalam mengolah data dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah penerapan teknologi informasi bagi pemerintah daerah dapat menambah efektifitas dan efisiensi bagi pemerintah itu sendiri karena dapat mempercepat penyampaian informasi dan jangkauan yang luas maka dari itu penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan basis teknologi informasi melalui media online menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*) walaupun di dalam prakteknya masih banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah salah satunya biaya yang tidak sedikit dan belum terjadi pemerataan fasilitas yang berbasis teknologi. dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat harus diimbangi dengan fasilitas yang dapat menunjang kinerja agar dapat lebih baik seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang sangat membantu dalam membuat laporan keuangan karena penggunaan internet dapat memangkas waktu dan biaya serta dapat mempercepat kinerja pembuat laporan dalam memberikan kepada pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian Nurillah & Muid, (2014)

menyatakan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan sedangkan dari penelitian Harnoni, (2016) Pemanfaatan Sistem teknologi Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dengan sistem pengendalian intern. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 520 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2012 menemukan 1.427 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	642
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	469
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	316
Jumlah		1.427

(sumber :[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)-IHPS II Tahun 2012)

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan”.

Indikator sederhana yang dapat kita pakai untuk menilai apakah suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkualitas adalah opini yang diperoleh oleh laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula (Harnoni, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2013) menyatakan sistem pengendalian intern

berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah sedangkan pada penelitian Yensi et al., (2014) menyatakan sebaliknya.

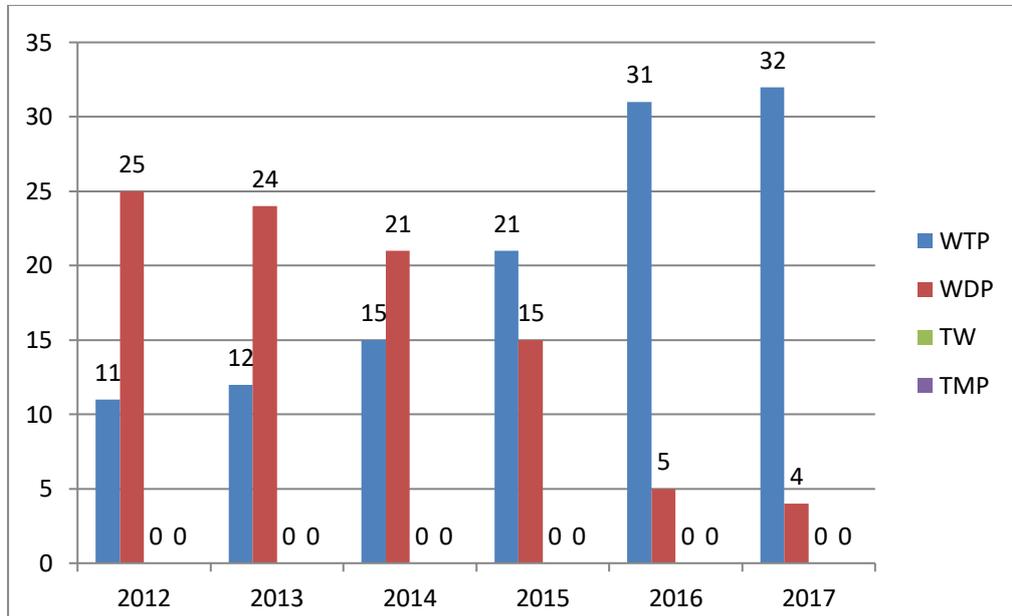
Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik

Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari perolehan opini yang dibuat oleh auditor. Opini yang dikeluarkan oleh auditor merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Mahmudi, (2016) opini audit dibagi ke dalam lima tingkatan, berikut tingkatan dari terendah ke tertinggi yaitu Tidak Memberi Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada lima tingkatan tersebut, opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD dan menandakan bahwa LKPD dianggap sudah berkualitas baik.

Suatu daerah diwajibkan meningkatkan kinerja pelaporan keuangan setiap tahunnya, pemerintahan kabupaten temanggung memiliki rekam jejak yang baik dalam membuat laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Opini WTP atas laporan keuangan tersebut merupakan yang ke 6 kalinya didapat oleh Pemkab Temanggung sejak tahun 2012.

Keberhasilan penyajian laporan keuangan Pemkab Tahun 2017, hingga mendapatkan opini yang dinyatakan oleh BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan hasil kerja

keras dan usaha bersama dari seluruh elemen dan semua pihak mulai dari Pejabat Pengguna Anggaran hingga staf (*TEMANGGUNG RAIH WTP KE 6 KALINYA*, 2018)



Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

**GAMBAR 1.1**

Trend Opini Pemeriksaan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

**TABEL 1.2.**

Perolehan Opini Kabupaten Temanggung

Entitas	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
Kab.Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hal tersebut pemerintahan kabupaten temanggung dapat menjadi salah satu contoh yang baik untuk membuat laporan keuangan daerah pemerintah dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya penulis tertarik meneliti fenomena yang terjadi, Keberhasilan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan daerah tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. peneliti tertarik meneliti di kabupaten temanggung karena pemerintahan kabupaten temanggung mendapat prestasi dalam membuat laporan keuangan sebanyak 6 kali opini WTP diberikan kepada kabupaten temanggung dari tahun 2012-2017.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawati, (2014) “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey dilakukan di Kabupaten Ciamis)” pada penelitian ini penulis menambah dua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Harnoni, (2016) dan merubah sampel penelitian yaitu pada organisasi pemerintah daerah kabupaten Temanggung alat analisis yang digunakan sama yaitu menggunakan SPSS. Sehingga Penulis Mengajukan Penelitian Dengan Judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Temanggung)**”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung?
3. Apakah penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik serta dapat menambah wawasan bagi pengguna informasi dan untuk mengembangkan topik bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatur pemerintahan.

b. Bagi SKPD

Penelitian ini diharapkan dapat memacu kinerja SKPD agar dapat konsisten dan semakin baik dalam membuat laporan keuangan daerah

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan terhadap masyarakat agar semakin sadar akan pengelolaan keuangan di daerah yang mereka tinggali.

d. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi salah satu referensi untuk kegiatan pendidikan.